

SEMINAR GAIKINDO INDONESIA INTERNATIONAL AUTO SHOW

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN**





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE (TERINTEGRASI)

PENYELENGGARAAN LAYANAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE MELIPUTI:

- Pendaftaran pengujian tipe kendaraan bermotor;
- Resume hasil pengujian tipe kendaraan bermotor;
- Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Kendaraan Bermotor;
- Pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor;
- Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya.

VTA ONLINE
([HTTPS://VTA.DEPHUB.GO.ID/](https://vta.dephub.go.id/))

SKRB ONLINE
([HTTPS://SKRB.DEPHUB.GO.ID/](https://skrb.dephub.go.id/))

SRUT ONLINE
([HTTP://
UJITIPERB.DEPHUB.GO.ID/](http://ujitiperb.dephub.go.id/))



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id

INI ADALAH PROSES LAHIRNYA KENDARAAN BERMOTOR



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN



Pertama, kendaraan diuji di BPLJSKB* baik itu kendaraan fisik lengkap atau kendaraan berupa landasan.



Setelah dinyatakan lulus,
maka terbitlah SUT**



Langsung mengajukan permohonan SRUT***
sesuai jumlah kendaraan yang akan diproduksi.

#SADARLAKU

- * BPLJSKB : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
- ** SUT : Sertifikat Uji Tipe
- *** SRUT : Sertifikat Registrasi Uji Tipe
- **** SKRB : Surat Keputusan Rancang Bangun
- ***** BPTD : Balai Pengelola Transportasi Darat

Uji Tipe untuk memastikan kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.



Karoseri membuat desain
rancang bangun dan diajukan
ke Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat untuk
disahkan menjadi SKRB****

SKRB sah



Karoseri membuat kendaraan
sesuai dengan SKRB.

kendaraan jadi



Karoseri mengajukan permohonan
untuk cek fisik di BPTD*****,
kecuali DKI Jakarta, di BPLJSKB.

cek fisik sesuai, mendapatkan BAP cek fisik



Berdasarkan BAP,
Ditjen Perhubungan Darat
menerbitkan SRUT

Sayangi Nyawa

#SuarakanKeselamatanJalan



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KENDARAAN IMPOR / PRODUKSI



Kendaraan Bermotor yang
diimpor
(Importir Umum & APM)

Kendaraan Bermotor yang
diproduksi/dirakit
(APM)

BEA CUKAI
FORM A

KEMENPERIN
-TPT Uji Tipe
-TPT Impor (diimpor)
- NIK (diproduksi/dirakit)

KEMENHUB
- SUT
- SRUT

POLRI
Regident KB



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

ALUR PROSES KENDARAAN BERMOTOR SAMPAI LAIK JALAN DARI RANCANG BANGUN (PERUSAHAAN KAROSERI)



SKRB
(Dit. Sarana TJ)



Kendaraan
(Karoseri KB)



BAP
(BPTD)



SRUT
(Dit. Sarana TJ)



BPKB & STNK
(Korlantas POLRI)



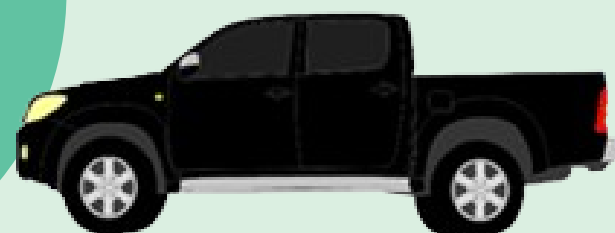
KARTU UJI
(Dit. Sarana TJ)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

GARIS BESAR PROSES SRUT APM/IU KENDARAAN BERMOTOR FISIK LENGKAP

SPESIFIKASI TEKNIS DAN
UNJUK KERJA YANG SAMA



GARIS BESAR PROSES
SRUT APM/IU
KENDARAAN
BERMOTOR FISIK
LENGKAP



SUT UJI FISIK
KB LENGKAP



SRUT



STNK



KARTU UJI/BUKU UJI



Ditjen Perhubungan Darat



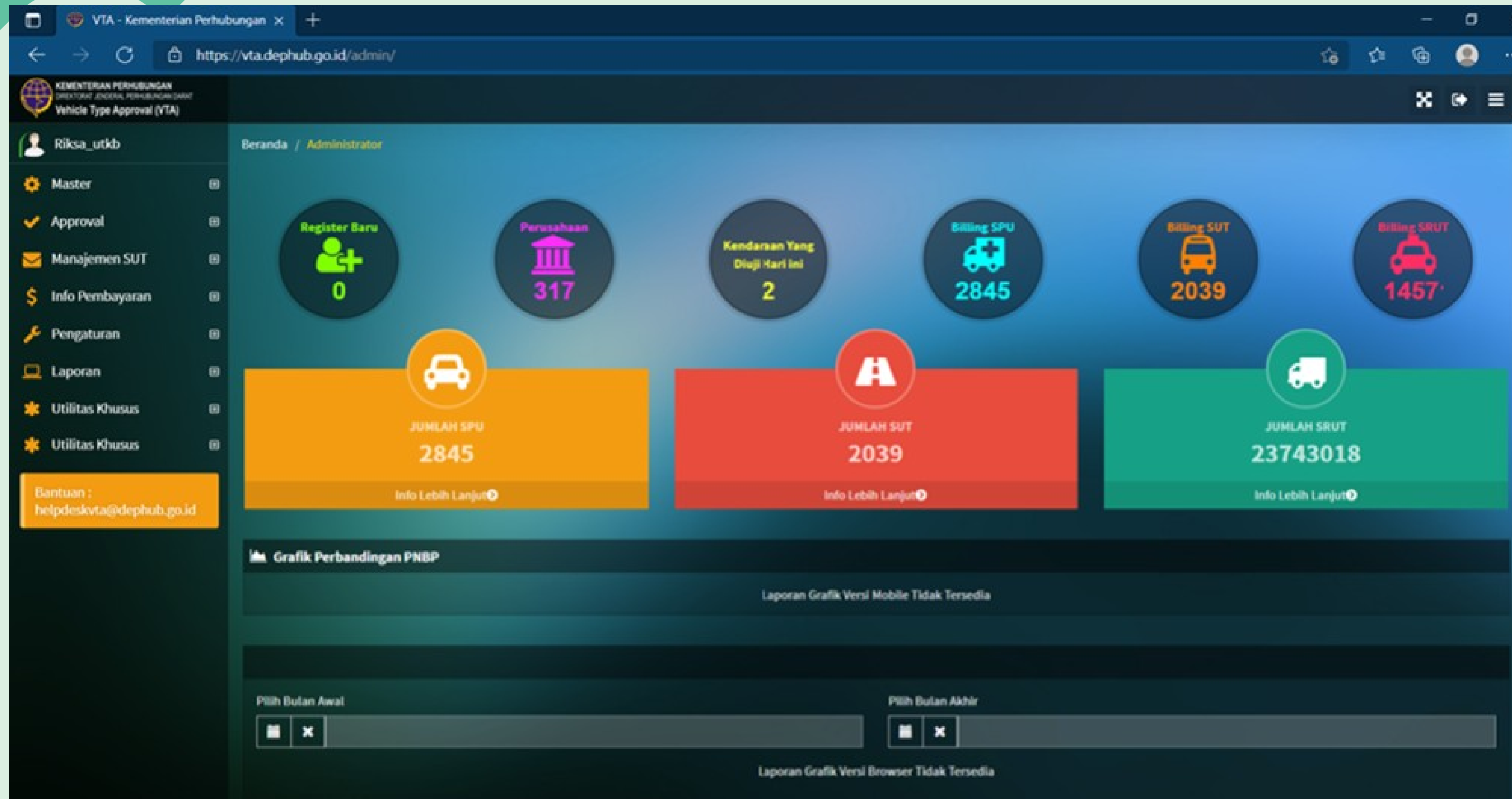
ditjen_hub
dat



hubdat1
51



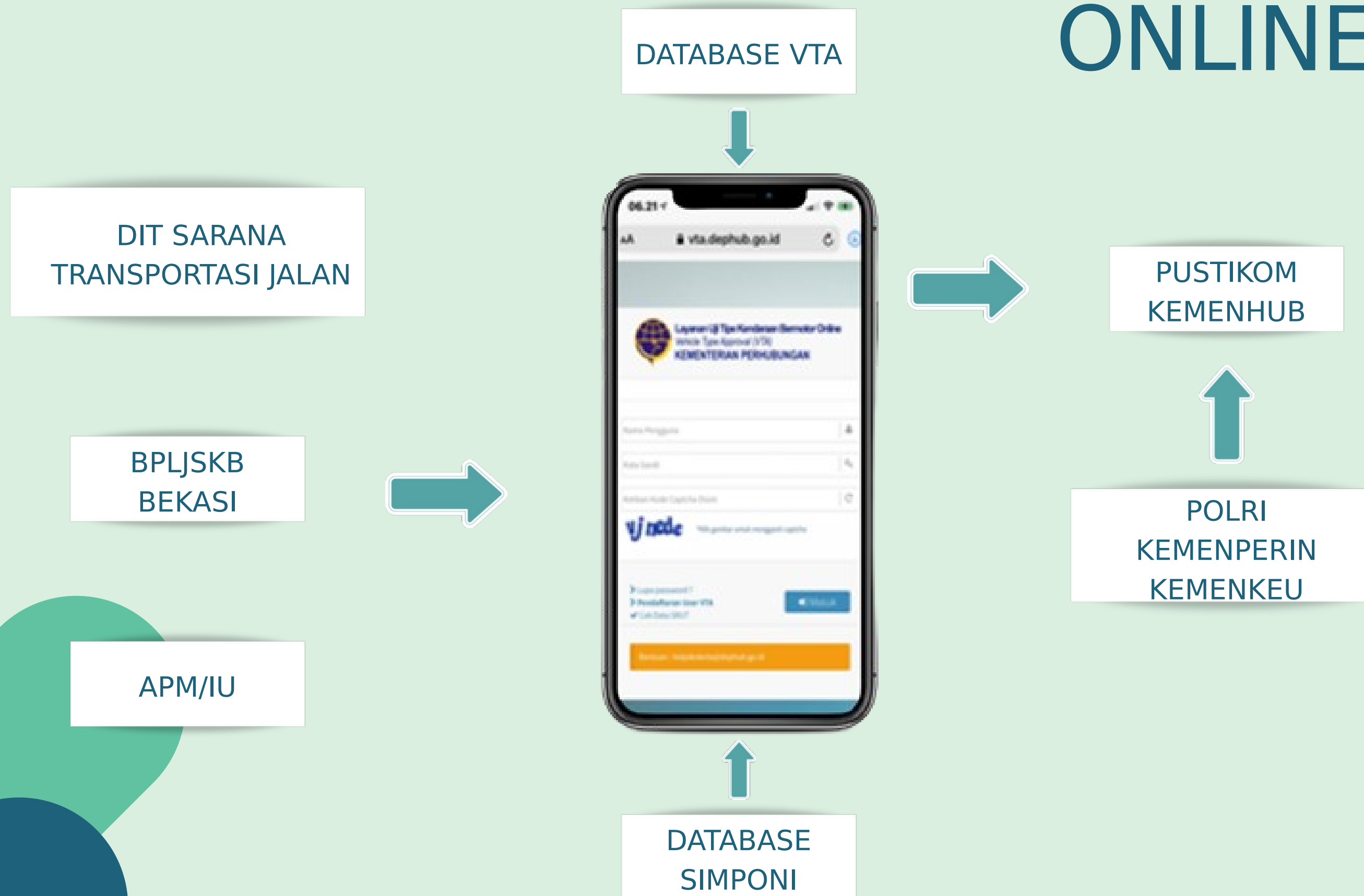
hubdat.dephub.
go.id





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

SISTEM VTA ONLINE





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT



Surat Kepada Korlantas &
Dishub kab./kota terkait
penggunaan Elektronik SRUT

Catatan :

SRUT berbentuk Blangko masih digunakan untuk kendaraan yang diproduksi berdasarkan SK Rancang Bangun / Perusahaan karoseri

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SRUT



Berbentuk Blangko



Elektronik SRUT
diaplikasikan untuk kendaraan
lengkap produksi APM/importir
umum berdasarkan SUT
kendaraan lengkap



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub



hubdat1

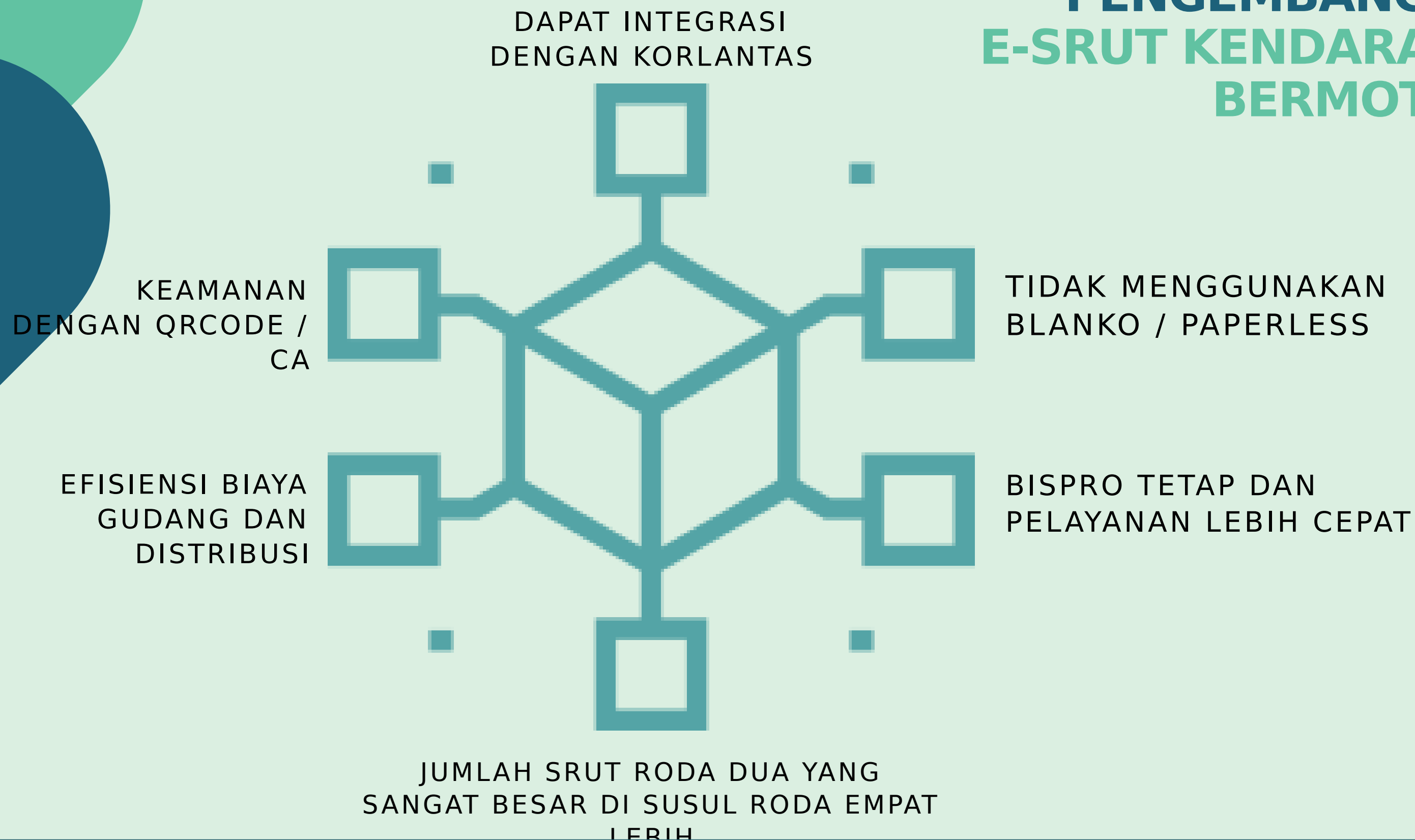


hubdat.dephub.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN E-SRUT KENDARAAN BERMOTOR



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



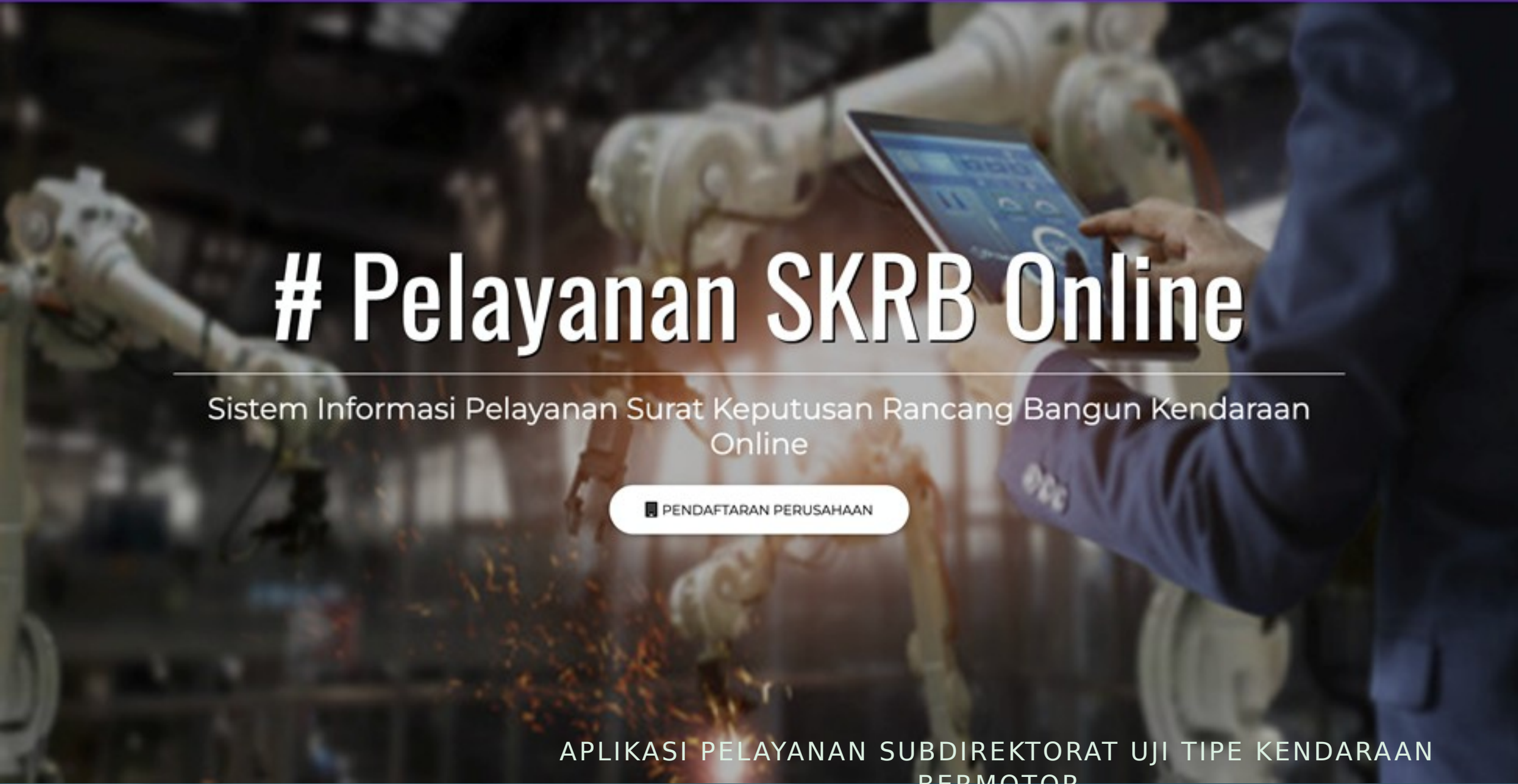
hubdat.dephub.
go.id



#PELAYANANSKRBONLINE



LOGIN KE SISTEM



Pelayanan SKRB Online

Sistem Informasi Pelayanan Surat Keputusan Rancang Bangun Kendaraan Online

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

APLIKASI PELAYANAN SUBDIREKTORAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

#PELAYANANSKRBONLINE

SKRB ONLINE ([HTTPS://SKRB.DEPHUB.GO.ID/](https://skrb.dephub.go.id/))

Merupakan sistem yang menangani pengajuan permohonan surat keputusan rancang bangun kendaraan bermotor yang diajukan oleh perusahaan karoseri (SEJAK OKTOBER 2020)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

CAPAIAN PERTAHAPAN SKRB ONLINE

2019

Seluruh permohonan SKRB diajukan secara manual, pemohon harus datang untuk menyerahkan dokumen permohonan

2019

2020

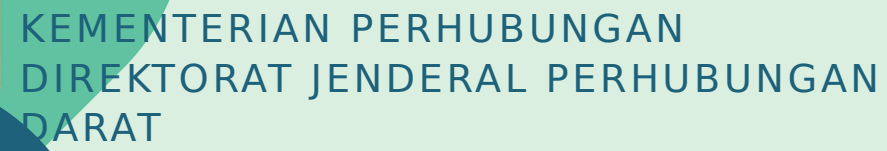
2020

Sejak tanggal 30 September 2020, pemohon dapat melakukan permohonan skrb jenis revisi dan varian melalui sistem SKRB Online.

2021

2021

Sejak tanggal 30 September 2020, pemohon dapat melakukan permohonan skrb jenis revisi dan varian melalui sistem SKRB Online

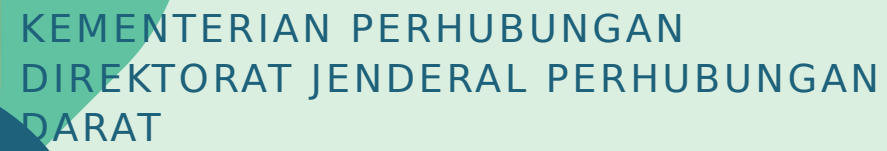


PERMOHONAN SKRB MANUAL

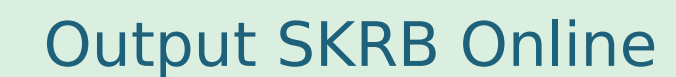
Tanda Terima Permohonan

Lembar Kerja Permohonan SKRB

Output SKRB Manual



PERMOHONAN SKRB ONLINE





#PELAYANANSRUTTB

SISTEM INFORMASI PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

HOME PENDAFTARAN TATA CARA FAQ LOGIN

SISTEM INFORMASI PEMERIKSAAN KESESUAIAN FISIK KENDARAAN

Untuk Meningkatkan Pelayanan Perizinan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Ditsarana Perhubungan Darat
Meluncurkan Sistem Perizinan SRUT RB dengan Moto : Hemat, Mudah dan Termonitor

Pendaftaran Disini

APLIKASI PELAYANAN SUBDIREKTORAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

#PELAYANANSRUTTB

SRUT RB (<http://ujitiperb.dephub.go.id/>)

Penerbitan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor (SRUT) Produksi Karoseri Diajukan Secara Online (SEJAK JULI 2018)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

TAHAPAN PENGUNAAN SISTEM SRUT

[HTTP://
UJITIPERB.DEPHUB.GO.ID](http://ujitiperb.dephub.go.id)



Permohonan AKUN
Perusahaan Wajib
Mendaftarkan
Perusahaannya
Pada Sistem Srut Untuk
Mendapatkan Akun.



Pengajuan Dokumen
Perusahaan Harus
Mengajukan Dokumen
Legalitas Perusahaan.



Melaporkan SKRB
Mendaftarkan SKRB Yang
Dimiliki Ke BPTD Sesuai
Domisili Perusahaan.



Mengajukan Permohonan
Jika Ketiga Proses Diatas
Telah Dilakukan Maka
Perusahaan Sudah Bisa
Mengajukan Permohonan
SRUT/Rubah Bentuk.



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

CEK KEABSAHAAN SRUT PRODUKSI KAROSERI

Ujitiperb - Sistem Registrasi Uji Tipe

HOME PENDAFTARAN TATA CARA FAQ LOGIN

NAMA PERUSAHAAN: EMAIL:

Masukkan Nama Perusahaan... Masukkan Email...

☐ Saya bertanggung jawab atas semua data yang diinput.

DAFTAR SEKARANG

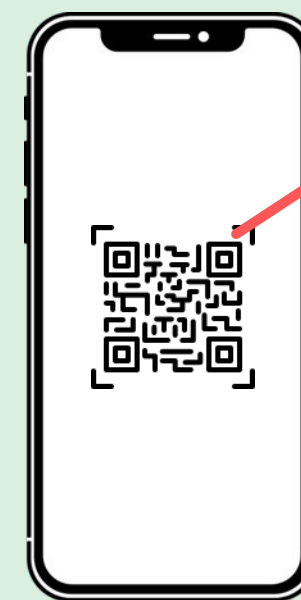
Masukkan No.SRUT...
Contoh: 70/XI/SRUT-60/DJPD-SPD/09/2018

Cari Data SRUT

SCAN QR CODE
menggunakan Aplikasi yang
ada di ANDROID atau IOS

NO SRUT
Masukan Nomor SRUT di
Website
<http://ujitiperb.dephub.go.id>

**CALL CENTER UJI
TIPE**
Konfirmasi ke Nomor WA
081389855451
(Call center uji tipe)



Masukkan No.SRUT:

Contoh: 70/XI/SRUT-60/DJPD-SPD/09/2018

Cari Data SRUT

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE
NOMOR: 70/XI/SRUT-60/DJPD-SPD/09/2018
(Unit Uji Tipe Pengkapan Persyaratan Pendaftaran dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Perusahaan: _____ Alamat: _____
dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor :
MEREK _____
TIPE _____
JENIS _____
PERUNTUKAN _____
VARIAN _____
KENDARAAN YANG DIREGISTRASI
- NOMOR RANGKA _____
- NOMOR MOTOR PENGGERAK _____
PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN: _____

SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR / VARIAN

Konfigurasi Sumbu	Jenis Sumbu	Dimensi	1. Jumlah Sumbu	2. Daya Motor Penggerak Maksimum	Bahan Bakar	Usutan Ban	Kapasitas Muatan
I - II	I - II	1. Lebar Total 2. Panjang Total 3. Tinggi Total 4. Jalar Depan 5. Jalar Belakang	1. Jumlah Sumbu 2. Jalar			1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV	1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV

JBB / JKB : _____ Kg / _____ Kg
BERAT KOSONG : _____ Kg
JBI / JBK : _____ Kg / _____ Kg
DAYA ANGKUT : _____ Kg atau _____ ORANG TERMASUK PENGEMUD, BARANG _____ KG
DIMENSI BAK MUATAN / TANGKI : _____

KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI : _____
TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN UNJUK KERJA YANG SAMA DENGAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN _____

TELAH DIREGISTRASI
A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NIP. _____
DJPD.00.000.000.BB

CATATAN : UNTUK PENGECEKAN MENGGUNAKAN SCAN QR CODE SETELAH DI SCAN
PASTIKAN DOMAIN UJITIPERB.DEPHUB.GO.ID

NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR





JENIS NORMALISASI

**KENDARAAN YANG
AKAN DILAKUKAN
NORMALISASI**

Kendaraan yang tidak
memiliki Buku Uji/KIR

Kendaraan yang memiliki
Buku Uji/KIR





NORMALISASI KENDARAAN ODOL

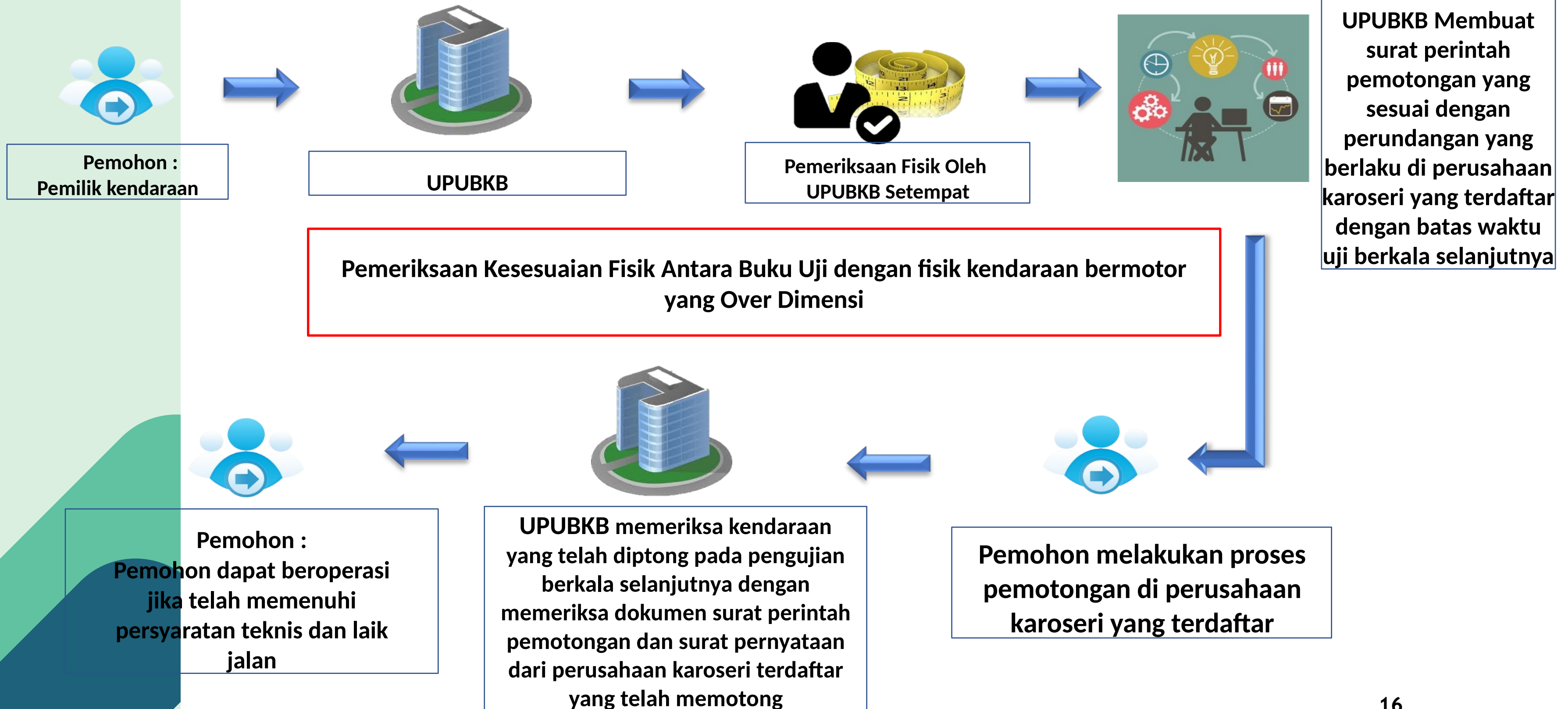
ALUR PROSES PENERBITAN SRUT SETELAH KENDARAAN NORMALISASI



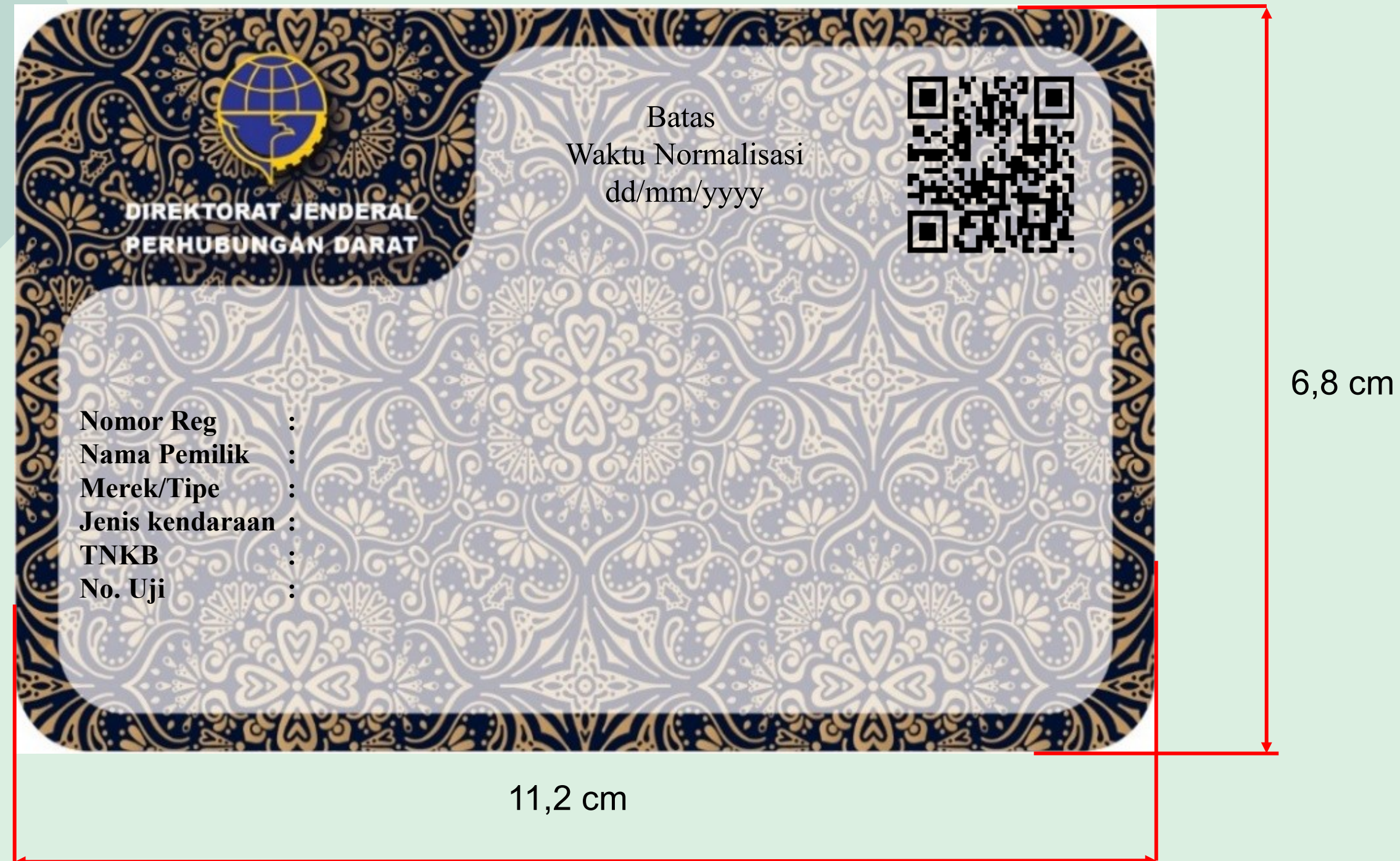


NORMALISASI KENDARAAN ODOL

ALUR PROSES NORMALIASI JIKA MEMILIKI BUKU UJI SAH



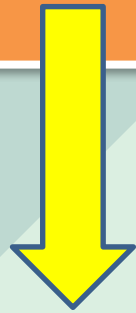
BENTUK DAN UKURAN STIKER NORMALISASI



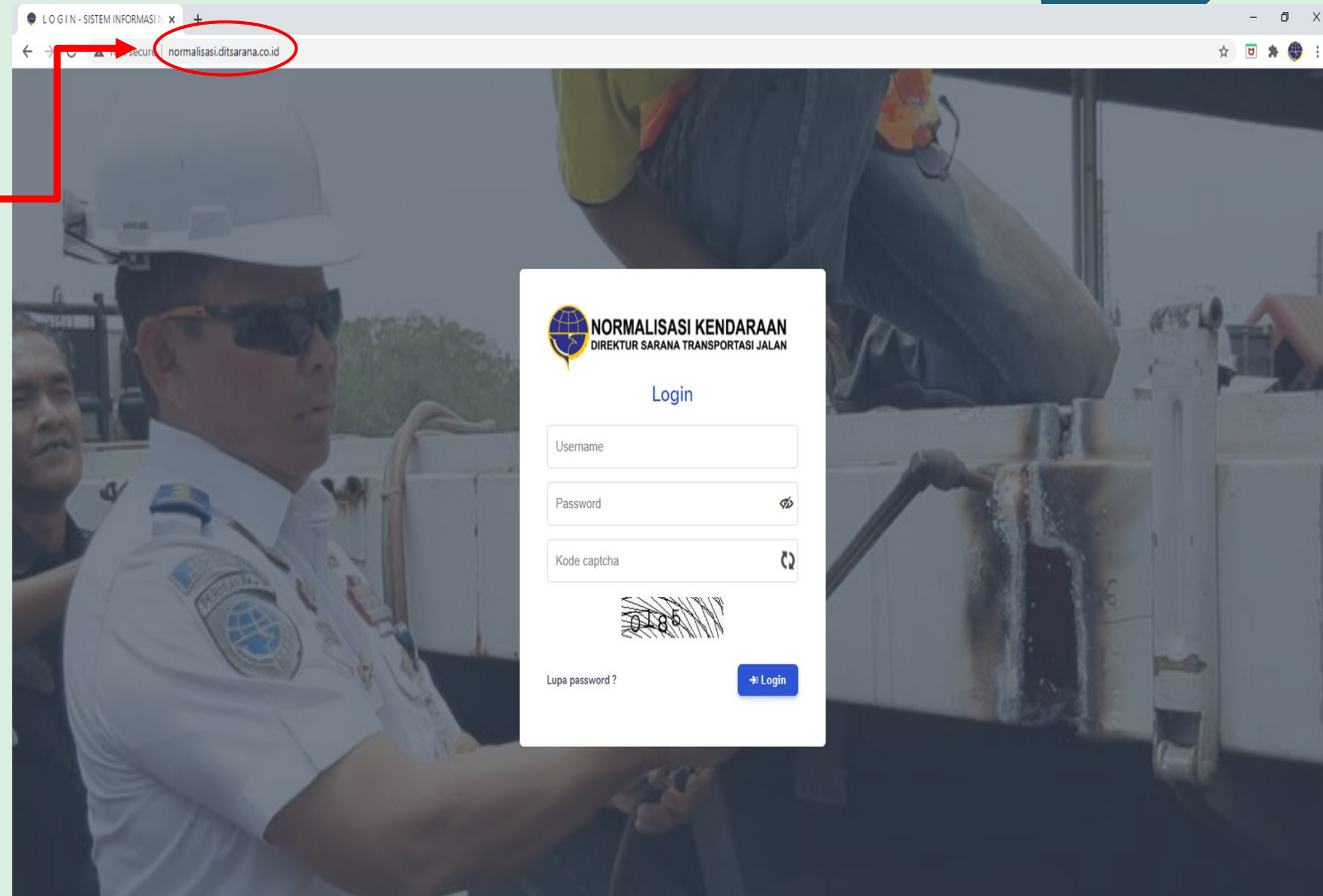
APLIKASI NORMALISASI

ALAMAT WEBSITE :

<http://normalisasi.ditsarana.co.id>



Sistem informasi untuk melakukan pendataan kendaraan yang akan maupun yang telah dilakuka normalisasi



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat

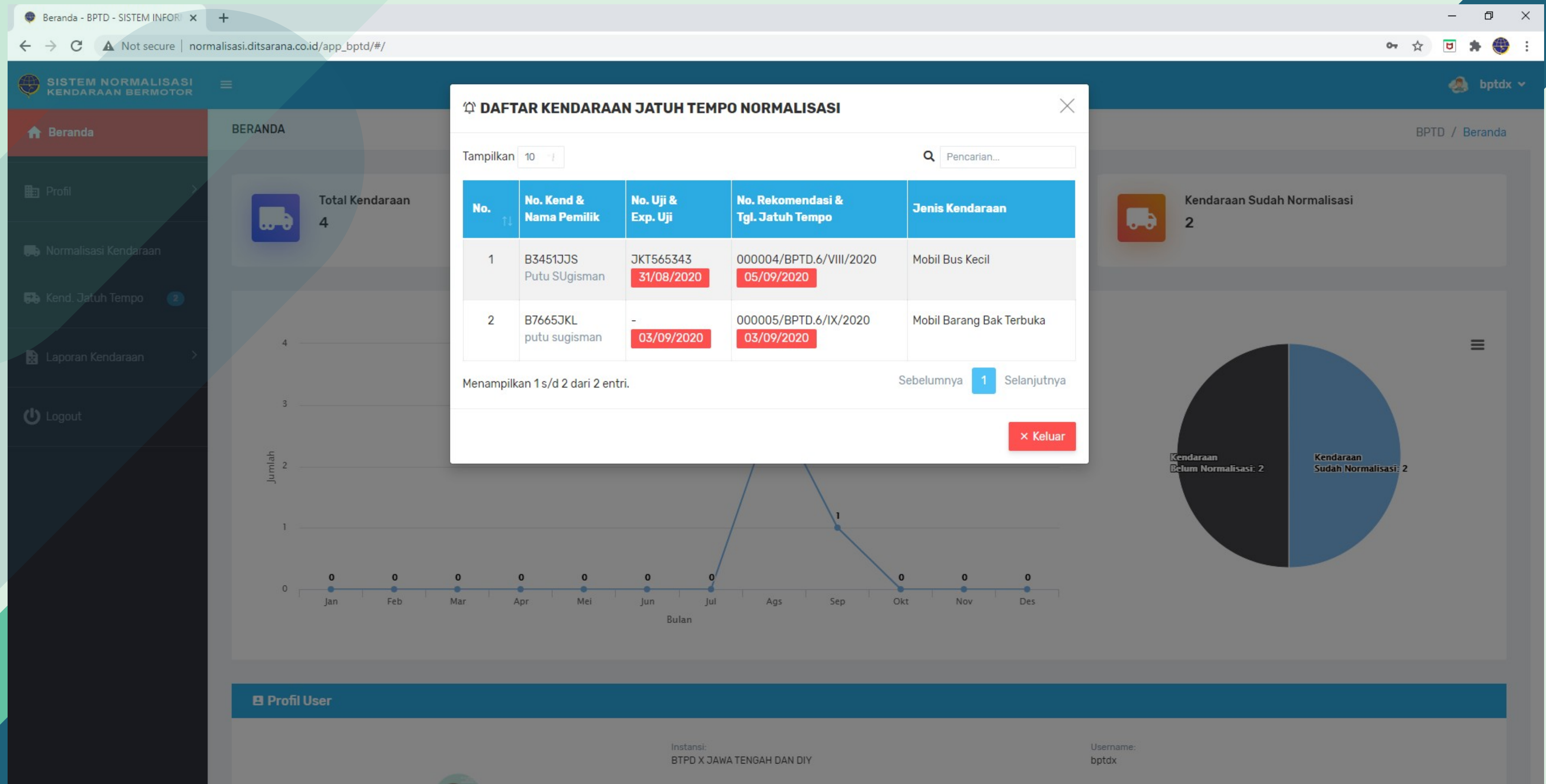


hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id

CONTOH TAMPILAN AKUN NORMALISASI



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id

CONTOH TAMPILAN AKUN NORMALISASI

Beranda - UPPKB - SISTEM INFO

Not secure | normalisasi.ditsarana.co.id/app_upkb/#/

SISTEM NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR

BERANDA

Total Kendaraan 4

DAFTAR KENDARAAN JATUH TEMPO NORMALISASI

Tampilkan 10 Pencarian...

No.	No. Kend & Nama Pemilik	No. Uji & Exp. Uji	No. Rekomendasi & Tgl. Jatuh Tempo	Jenis Kendaraan
1	B6505UVD PUTU SUGISMAN	JBG-100002 04/09/2020	000003/UPPKB.5/IX/2020 14/09/2020	Mobil Bus Kecil
2	B6656HJK PUTU UJI COBA	B6656HJK667 31/08/2020	000002/UPPKB.5/IX/2020 03/09/2020	Mobil Bus Kecil
3	B678GGH uji coba data normalisasi	B678GGH 01/09/2020	000001/UPPKB.5/IX/2020 01/09/2020	Mobil Barang Bak Terbuka

Menampilkan 1 s/d 3 dari 3 entri.

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Keluar

Jumlah

Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Profil User

Instansi: PKB KAB. SRAGEN

Username: dishubsragen

Alamat: Jl. Kyai H. Agus Salim No.13, Sukorejo, Kroyo, Kec. Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57211

IP Address: 162.158.165.50

dishubsragen

UPPKB / Beranda

Kendaraan Sudah Normalisasi 0

Kendaraan Sudah Normalisasi 0

Kendaraan Jatuh Tempo Normal

Not secure | normalisasi.ditsarana.co.id/app_upkb/#/kendjatuhtempo

SISTEM NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR

UPPKB / Kendaraan Jatuh Tempo Normalisasi

NORMALISASI

Jatuh Tempo Normalisasi Kendaraan

Export Excel Show 10 rows

Pencarian...

No.	Jenis Kendaraan	No. Kendaraan	No. Uji	No. Rangka	No. Mesin	Batas Waktu	Aksi
1	Mobil Bus Kecil	B6505UVD	JBG-100002 04/09/2020	NR5234512442124	NM5234541214214	14/09/2020	Normalisasi
2	Mobil Bus Kecil	B6656HJK	B6656HJK667 31/08/2020	B6656HJK66765464	B6656HJK667	03/09/2020	Normalisasi
3	Mobil Barang Bak Terbuka	B678GGH	B678GGH 01/09/2020	B678GGHB678GGH	B678GGHB678	01/09/2020	Normalisasi

Menampilkan 1 s/d 3 dari 3 entri.

Sebelumnya 1 Selanjutnya



CONTOH SURAT PEMOTONGAN KENDARAAN

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

JL. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam
Bandara Int SMB II Palembang - 30961

Telp. : 0711 - 57166815
Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id

Fax. : 0711 - 5716815

SURAT PERINTAH PEMOTONGAN/NORMALISASI DIMENSI
NOMOR : 000002/BPTD.9/IX/2020

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEUKU REZA MOENZIER, SH
NRP : 197909022000121003
Kompetensi : Penguji kendaraan bermotor
Instansi : BPTD WILAYAH VII SUMSEL & BABEL

Dengan ini menetapkan dimensi kendaraan bermotor :

No. TNKB : BG8618
No. Uji : AF71C02061604
Tgl habis uji : 06 Januari 2021
Merek : MITSUBISHI
Tipe : FUSO FM 517 H
Jenis : Mobil Barang Bak Terbuka
Rekomendasi :

agar segera dinormalisasikan sebelum batas waktu normalisasi

Batas Waktu Normalisasi : 12 Desember 2020

2. Pemotongan/normalisasi wajib dilakukan di perusahaan karoseri atau bengkel karoseri;
3. Pada saat akan melaksanakan uji berkala selanjutnya wajib membawa surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- dari perusahaan karoseri atau bengkel karoseri yang telah memotong;
4. Demikian surat perintah pemotongan/normalisasi ini dibuat, kendaraan ini dalam pengawasan over dimensi.



Kota Palembang, 16 September 2020
A.N. KEPALA DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN

TEUKU REZA MOENZIER, SH
NRP. 197909022000121003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Darat;





Pemanfaatan Lahan untuk Proyek Proving Ground Bekasi



Ditjen Perhubungan Darat



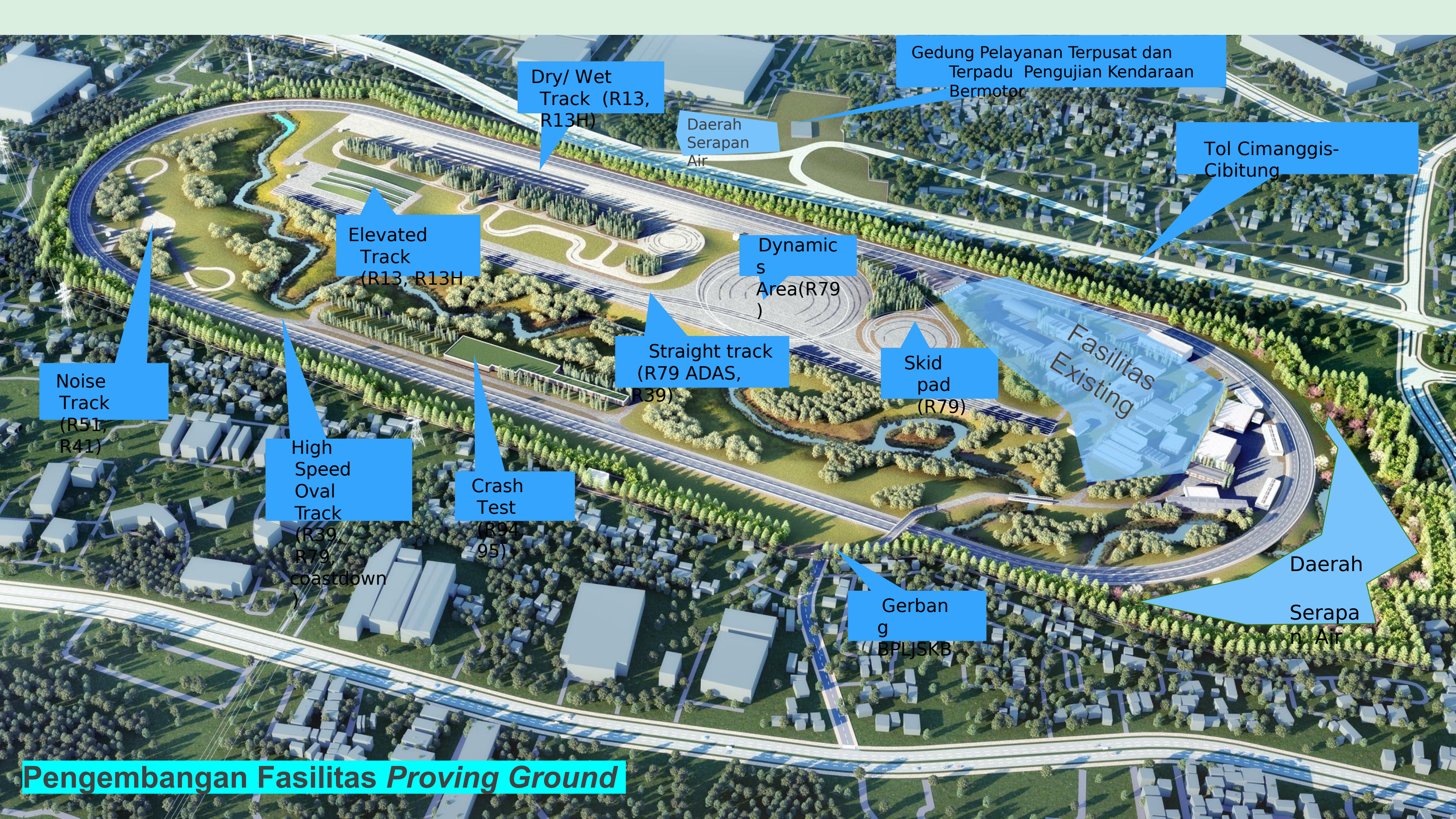
ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



Dry/ Wet
Track (R13,
R13H)

Daerah
Serapan
Air

Gedung Pelayanan Terpusat dan
Terpadu Pengujian Kendaraan
Bermotor

Tol Cimanggis-
Cibitung

Elevated
Track
(R13, R13H)

Dynamic
S
Area(R79
)

Straight track
(R79 ADAS,
R39)

Skid
pad
(R79)

Fasilitas
Existing

Noise
Track
(R51,
R41)

High
Speed
Oval
Track
(R39,
R79,
coastdown
)

Crash
Test
(R94,
95)

Gerban
g
(BPLJSKB)

Daerah
Serapa
n Air

Pengembangan Fasilitas *Proving Ground*

Manfaat yang Akan Diperoleh



PENJAMINAN & INFRASTRUKTUR
Guarantee & Infrastructure



1. Memiliki fasilitas laboratorium pengujian kendaraan bermotor dengan internet



2. Meningkatkan minat investasi asing untuk membangun industri otomotifnya



3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara serta peningkatan ekspor otomotif melalui pelabuhan terdekat



4. Meningkatkan kesempatan perolehan lapangan pekerjaan di sektor formal dan informal



5. Proving ground yang akan dibangun sudah mengakomodir perkembangan teknologi otomotif yang akan datang (kendaraan listrik)

UNR Lingkup Proving Ground Bekasi

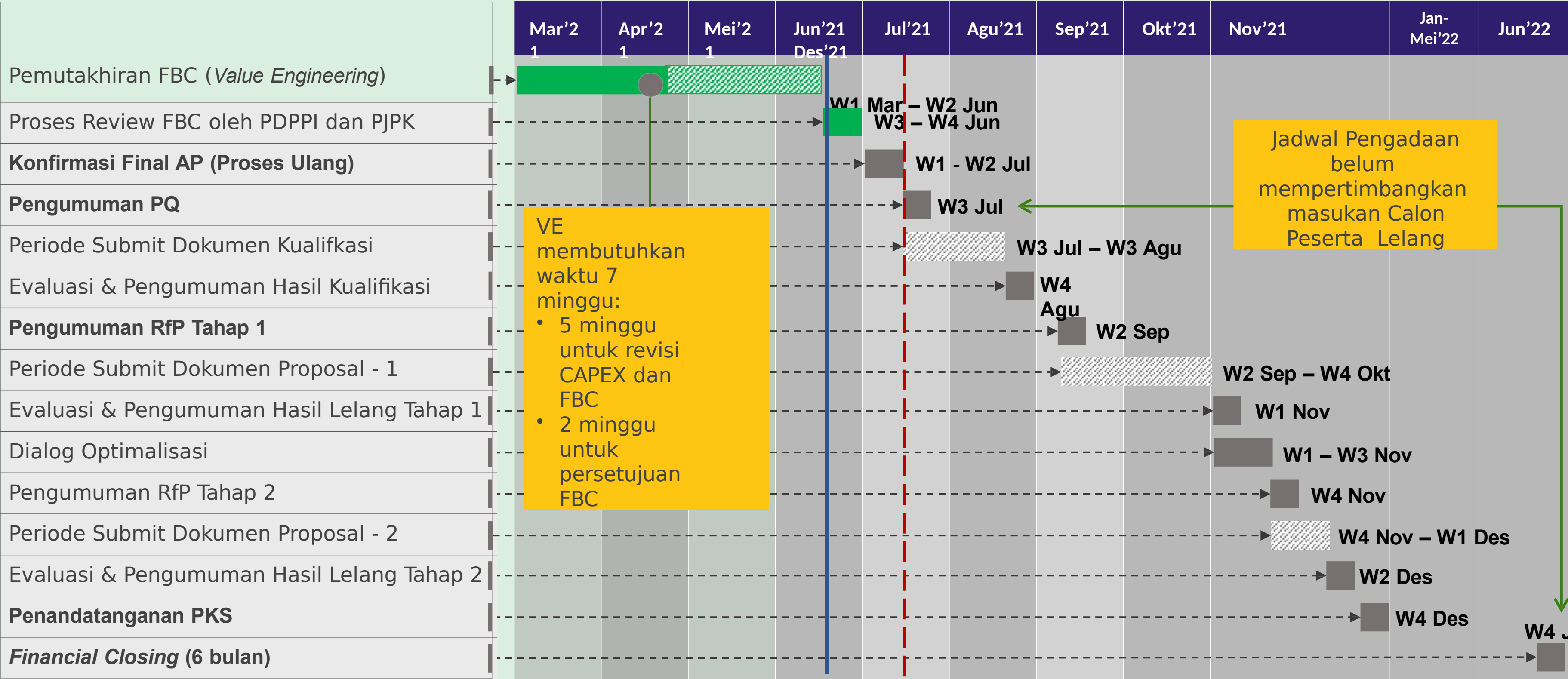
No.	UNR	Deskripsi	Seri	Lokasi Pengujian
Lingkup ASEAN MRA Tahap 1				
1	R13	Braking System	11 series	Outdoor
2	R13H	Braking System	00 series	Outdoor
3	R17	Seats	08 series	Indoor
4	R28	Audible Warning Device	00 series	Outdoor
5	R39	Speedometer	01 series	Outdoor
6	R41	Noise Emission L category	03 series	Outdoor
7	R46	Rear View Mirror	04 series	Indoor
8	R51	Noise emission	02 series	Outdoor
9	R79	Steering Equipment	03 series	Outdoor
10	R14	Seat Belt Anchorage	09 series	Indoor
Lingkup Tambahan				
11	R94, R95	Crash Test	03 series dan 03 series	Indoor
12	R140	Electronic Stability Control (ESC)	00 series	Outdoor
13	R100	Electric Power Trained Vehicle	02 series	Indoor
14	R101	CO2 Emission / Fuel Consumption	01 series	Outdoor dan Indoor
15	R136	Electric Vehicle of Category L	00 series	Indoor
16	R138	Quiet Road Transport Vehicle (QRTV)	01 series	Outdoor

2021



Estimasi Timeline Proyek

- Keterangan:**
- Jangka Waktu Penyerahan Dok. Kualifikasi -> 5 minggu (W3 Jul s.d. W3 Agu 21)
 - Jangka Waktu Penyerahan Dok. Penawaran T-1 -> 7 minggu (W2 Sep s.d. W4 Okt 21)
 - Jangka Waktu Penyerahan Dok. Penawaran T-2 -> 2 minggu (W4 Nov s.d. W1 Des 21)

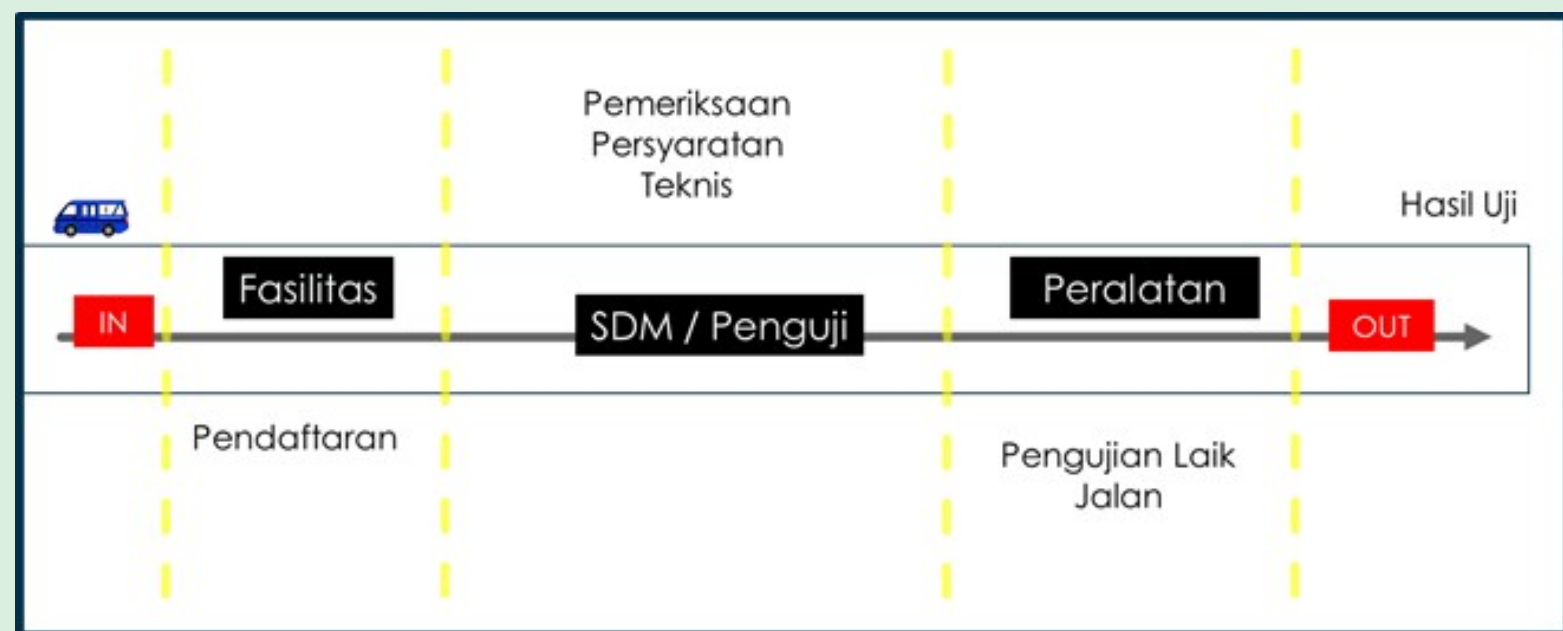


Tambahan waktu untuk memastikan
R03 eksisting dan pemilihan asumsi kelengkapan yang
dipakai



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

SKEMA BUKU LULUS UJI ELEKTRONIK



BUKTI LULUS UJI
ELEKTRONIK

BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK



KARTU PINTAR



STIKER
HOLOGRAM



SERTIFIKA
T



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

BUKTI UJI LULUS KENDARAAN BERMOTOR

BUKTI LULUS UJI NON-ELEKTRONIK

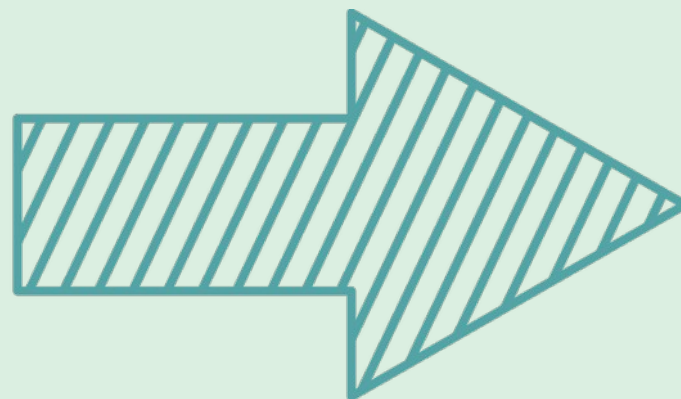
BUKU UJI



PLAT Uji



KARTU TEMPEL
SAMPING



BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK

SMART CARD



STIKER HOLOGRA



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK (BLU-E)

BLU-E VERSION 1

SMART CARD (OFFLINE)
DATA KENDARAAN TERSIMPAN DI
DALAM KARTU DAN DAPAT
DIAKSES SECARA OFFLINE
DENGAN NFC



QRCERTIFICATE



STIKER HOLOGRAM



BLU-E VERSION 2

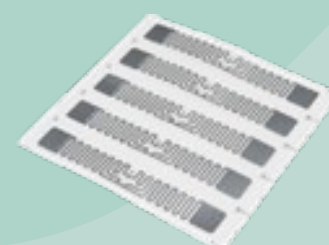
SMARTCARD(ONLINE)
DATA KENDARAAN TIDAK TERSIMPAN
DALAM KARTU MELAINKAN DIDATA
CENTER DAN HARUS DIAKSES
SECARA ONLINE. KARTU HANYA
SEBAGAI TANDA
IDENTITAS KENDARAAN.



QRCERTIFICATE



RFID TAG





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

PENGEMBANGAN BLU-E VERSI 2

SINKRONISASI DATA ANTARA PUSAT DAN DAERAH

- DARI 473 UPPKB SE-INDONESIA, HANYA 297 UPPKB YANG SUDAHTERAKREDITASI.
- Setiap UPPKB memiliki sistem yang berbeda satu dengan yang lain dan belum terintegrasi.

TUJUAN UMUM DITJEN HUBDAT

MENGURANGI POTENSI HUMAN ERROR

PROSES PENGUJIAN DAN PENGECEKAN KENDARAAN DENGAN KUANTITAS YANG TINGGI PER HARINYA BERPOTENSI MENYEBABKAN INAKURASI JIKA DILAKUKAN SECARA MANUAL.

MENCEGAH POLITISASI OLEH OKNUM OPERATOR

75% PELANGGARAN OLEH OPERATOR DAPAT DICEGAH DAN DIKURANGI DENGAN PENGGUNAAN RFID DAN pengintegrasian data.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

30

PROVINSI SUDAH MENERAPKAN BUKTI LULUS UJI
ELEKTRONIK



SISTEM
TERPUSAT

RENCANA PENGEMBANGAN

:



Peningkatan Smartcard menjadi berbasis java dan bersifat pembacaan data online dan di hubungkan ke server data uji kendaraan menggunakan pembacaan sistem RFID. RFID reader di tempatkan di Jembatan Timbang, Jalan Toll, dan Terminal

INTEGRASI DATA

DATA
BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK



NFC
READER



SCAN QR CODE
PADA
SERTIFIKAT



SCAN QR
CODE
PADA STIKER



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

PENYELENGGARAAN UJI BERKALA

OLEH APM ATAU SWASTA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Transportasi, Perizinan penyelenggaraan uji berkala oleh APM atau Swasta di atur di dalamnya. Perlu dilakukan Koordinasi lebih lanjut untuk pelaksanaan menggunakan Online Single Submission (OSS)



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

APA LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MEMINIMALISIR KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM



PERMENHUB NO. 85 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KONSEP SMK

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN



SMK adalah Tata Kelola keselamatan dari manajemen perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan

✓ Implementasi SMK ditujukan menurunkan fatalitas korban kecelakaan yang melibatkan Bus angkutan umum à Target RUNK 2011-2035 (Pilar 1)

✓ Keselamatan adalah Investasi



MANFAAT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN BAGI OPERATOR

Memastikan terimplementasinya
manajemen keselamatan baik di area
kantor
maupun di jalan/sepanjang urute
angkutan yang dilayani;

Mencegah terjadinya kecelakaan,
sehingga terhindar dari kerugian
yang lebih besar;

Meningkatkan Citra Perusahaan sebagai
perusahaan angkutan modern dan
peduli pada isu keselamatan;

Sebagai bentuk tanggung jawab
terhadap keselamatan pengguna jasa
angkutan jalan.





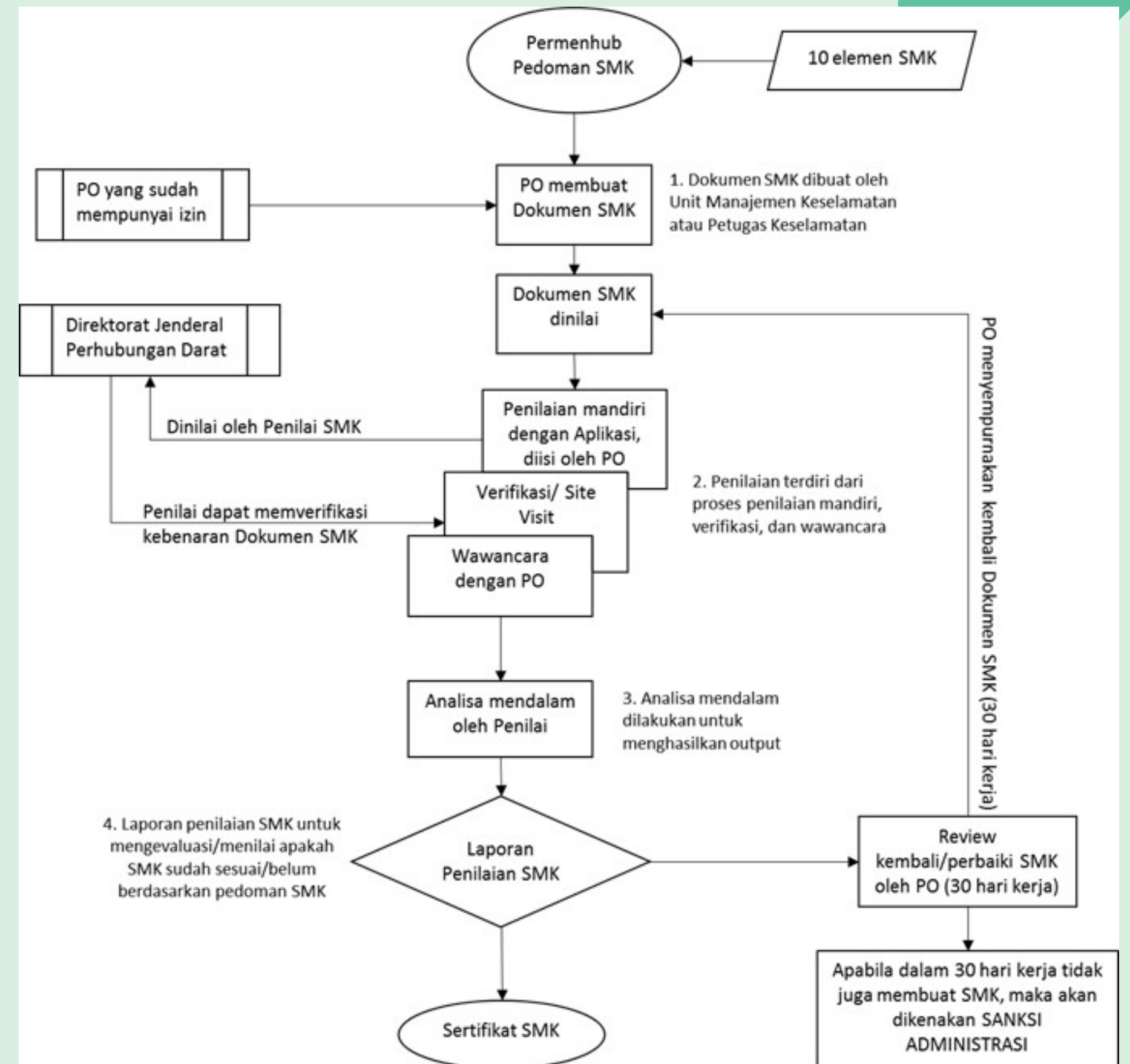


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PERDIRJEN

Nomor: KP.1990/AJ.503/DRJD/2019

Tentang Tata Cara Penilaian SMK - PAU



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

SERTIFIKAT KELULUSAN SMK PAU

No Sertifikat : / /


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sertifikat
Certificate

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF PUBLIC TRANSPORT COMPANY

Berdasarkan
Based on

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia
Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Number 85 of 2018 concerning the Safety Management System of Public Transportation Company

MENYATAKAN BAHWA
THIS IS TO CERTIFY THAT

Nama Perusahaan / Name Of Company
PT. NAMA
P.O NAMA
Alamat / Address
Jalan. Keselamatan transportasi

Telah Memenuhi 10 (Sepuluh) Element Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Has fulfilled 10 (ten) elements of the Public Transport Company of Safety Management System

Sertifikat Ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan
This Certificate is valid for 5 (Five) years from the Date of Issue.


SMK PAU

Jakarta, 2019
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.
NRP. XXXXXXXXXX



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

SURAT EDARAN KEWAJIBAN

Menyusun Dokumen

Sistem Manajemen Keselamatan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506136,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3506179

email : djperhubdat@dephub.go.id

Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : **AJ. 503 / 1 / 2 / 09 JD / APR 1** Jakarta, 15 Februari 2021

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Kewajiban menyusun Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Penumpang AKAP dan Pariwisata

Kepada :

Yth. Para D
Angkut
dan Pa

di -

TEMP

1. Dasar

- Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tent Angkutan Jalan Pasal 204 ayat (1) bahwa perusa wajib membuat, melaksanakan dan meny Manajemen Keselamatan dengan berpedoman pa
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tei Pasal 94 bahwa Perusahaan Angkutan Um melaksanakan, dan menyempurnakan sistem ma dengan berpedoman pada RUNK LLAJ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 27 Perusal wajib membuat, melaksanakan, dan meny Manajemen Keselamatan Perusahaan Angku berpedoman pada RUNK LLAJ;
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan I
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubi KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 tentang Tata Ca Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan I

- Memperhatikan hal tersebut di atas serta dalam keselamatan angkutan jalan, bersama ini kami sampa berikut :

- Setiap perusahaan angkutan penumpang umum termasuk AKAP dan Pariwisata wajib untuk menyiapkan informasi dan menyusun dokumen yang terkait dengan penerapan sistem manajemen keselamatan. Panduan dalam menyusun dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dapat diunduh di <http://bit.ly/PanduanSMK>.
 - Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana dimaksud pada yang telah disusun pada perusahaan Saudara selanjutnya agar disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk dilakukan penilaian. Bagi dokumen Sistem Manajemen Keselamatan yang telah memenuhi syarat selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan. Apabila dinyatakan sesuai akan diterbitkan sertifikat
- Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 tahun 2018 Pasal 18 ayat (2) bahwa bagi Perusahaan yang tidak Menyusun dokumen Sistem Manajemen Keselamatan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.
 - Informasi lebih lanjut terkait penyusunan dan penyampaian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan perusahaan angkutan umum dapat menghubungi Subdit Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, up :
- Hamka : 0812 42888 8606
Email : smka.sarana@gmail.com
- Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

- Sesditjen Perhubungan Darat;
- Direktur Sarana Angkutan Jalan;
- Direktur Angkutan Jalan;
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia;
- Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia;
- Ketua DPP Organda.



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

SURAT EDARAN KEWAJIBAN

Menyusun Dokumen
Sistem Manajemen Keselamatan

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL.P. : (021) 3506130,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506128,
3506145, 3506143, 3506179

email : djperhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : UM.006/4/
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Kewajiban M
dan Menye
Sistem Mana

Yth. Pimpinan Perusahaan

Dalam rangka melaksanakan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 2014 tentang Angkutan tentang Keselamatan Lalu Lintas Umum wajib membuat, Keselamatan Perusahaan A Menteri Perhubungan No Perusahaan Angkutan Umum Nomor KP.1990/AJ.503/DI Keselamatan Perusahaan A

Memperhatikan hal tersebut, angkutan jalan, bersama ini

1. Setiap perusahaan angkutan barang khusus wajib un dengan penerapan sistem manajemen ke <http://bit.ly/PanduanSMK>.

2. Dokumen Sistem Manajemen disusun pada perusahaan Jenderal Perhubungan penilaian. Bagi dokumen selanjutnya akan dilakukan

3. Sesuai Peraturan Menteri Perusahaan yang tidak dikenakan sanksi administratif pencabutan izin.

4. Informasi lebih lanjut terkait penyusunan dan penyampaian dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dapat menghubungi Subdit Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, up :

Akhmad Samsul Arifin : 0813 2938 2865
Arifin : 0813 1703 0013
Email : emka.dstj@mydrive.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.


Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Budi Gunadi, S.H., M.Si.

Tembusan:

1. Sekretaris Perhubungan Darat;
2. Direktur Sarana Angkutan Jalan;
3. Direktur Angkutan Jalan;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia;
6. Ketua DPP ORGANDA;
7. Ketua DPP Aprindo.

Keselamatan



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

PERLENGKAPAN KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR SELAIN SEPEDA MOTOR



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TELAH MENGIRIMKAN SURAT KEPADA KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN) PERIHAL PERMOHONAN PENERBITAN SNI UNTUK APAR KENDARAAN BERMOTOR



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : dijenhudat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.502/6/8/DRJD/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Alat Pemadam Api Ringan Kendaraan Bermotor

Jakarta, 2 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Di -

JAKARTA

- Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.972/AJ.502/DRJD/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Fasilitas Tanggap Darurat Kendaraan Bermotor, yang salah satunya mengatur mengenai Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Dapat kami sampaikan bahwa peraturan tersebut disusun sebagai pedoman dengan tujuan untuk;
 - Meningkatkan keselamatan berkendara di jalan dan mencegah terjadinya korban kecelakaan dan kebakaran pada Kendaraan Bermotor;
 - Menjamin standarisasi pemenuhan persyaratan teknis Alat Pemadam Api Ringan; dan
 - Menjamin standarisasi bahan, kapasitas, penempatan, dan cara penggunaan Alat Pemadam Api Ringan.
- Menindaklanjuti butir 1 (satu) tersebut di atas, agar kualitas produk dari APAR yang akan diaplikasikan dapat terjamin kualitasnya serta mempertimbangkan tuntutan perkembangan ekonomi serta kelancaran iklim usaha dan persaingan yang sehat, dengan ini kami memohon untuk diterbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk APAR yang akan digunakan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tersebut (dokumen terlampir).
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Tembusan :
1. Sesditjen Perhubungan Darat;
2. Kepala BPLJSKB Bekasi.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

PERLENGKAPAN KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR SELAIN SEPEDA MOTOR :

- **SABUK KESELAMATAN**
- BAN CADANGAN
- SEGITIGA PENGAMAN
- DONGKRAK
- PEMBUKA RODA
- HELM DAN ROMPI PEMANTUL CAHAYA BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH YANG TIDAK MEMILIKI RUMAH-RUMAH
- PERALATAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)
- ALAT PEMANTUL CAHAYA TAMBAHAN
- FASILITAS TANGGAP DARURAT
- PERISAI KOLONG BELAKANG
- PERISAI KOLONG SAMPING





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

**PERLENGKAPAN
KESELAMATAN PADA
KENDARAAN
BERMOTOR YANG
TELAH MASUK PADA
PERUBAHAN KEDUA
PM 33 TAHUN 2018**

• **BAN CADANGAN**

- SEGITIGA PENGAMAN
- DONGKRAK
- ALAT PEMBUKA RODA
- ALAT PEMADAM API RINGAN
- ALAT PEMECAH KACA
- GANJAL BAN
- ALAT PEMANTUL CAHAYA TAMBAHAN



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

AKSI KESELAMATAN JALAN



5 AKSI
DALAM MENCIPTAKAN
#JalanUntukKeselamatan

1

Membangun jalan beserta
perlengkapannya



2

Menetapkan batas kecepatan yang
sesuai dengan fungsi masing-masing
jalan



3

Menaati batas
kecepatan



4

Memasang fitur
keselamatan pada
kendaraan



5

Meningkatkan kesadaran
tentang bahaya berkendara
dengan kecepatan tinggi di jalan



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



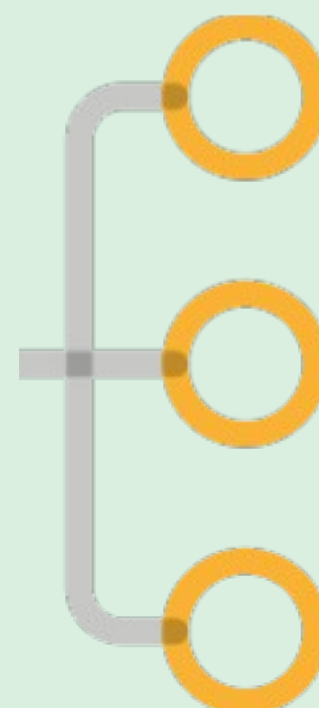
hubdat.dephub.
go.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

HAL-HAL YANG DIATUR PERATURAN MENTERI NO. PM 59 TAHUN 2020 KESELAMATAN PESEPEDA DI JALAN

Tujuan Pengaturan: untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan



PERSYARATAN TEKNIS
SEPEDA

TATA CARA
BERSEPEDA

FASILITAS
PENDUKUNG SEPEDA



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hub
dat



hubdat1
51



hubdat.dephub.
go.id



KETENTUAN- KETENTUAN LAIN

Jika tidak terdapat lajur khusus sepeda dapat dioperasikan di trotoar dengan memperhatikan keselamatan pejalan kaki, dan/atau di jalan dengan menggunakan bagian sisi jalan paling kiri.

Fasilitas parkir wajib disediakan pada setiap penyelenggara fasilitas umum, antara lain simpul transportasi, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah.

Penetapan Lajur khusus Sepeda oleh Menteri, Gubernur, dan bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TERIMAKASIH